

Esai

Antara Janji Populis dan Realitas Politik

Afthonul Afif

Penstudi Psikologi Politik

Email: psycho.afif@gmail.com

Tahun Pertama sebagai Cermin Psikologi Politik

Dalam lanskap politik Indonesia, “setahun pertama” bukan sekadar penanda waktu, melainkan ritual evaluatif yang sarat makna psikologis. Ia menciptakan ruang simbolik di mana publik menanam harapan, elite membangun citra, dan media menyusun narasi. Dalam tradisi psikologi politik, momen transisi kekuasaan seperti ini disebut sebagai fase “kondensasi harapan” ketika ekspektasi kolektif dipadatkan dalam figur pemimpin baru, dan setiap gestur awal dibaca sebagai pertanda arah kekuasaan (Priyetno, 2024). Harapan bukan hanya soal kebijakan, tetapi tentang pemenuhan kebutuhan emosional warga: untuk merasa dilihat, didengar, dan dijanjikan masa depan.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampil sebagai pasangan yang secara simbolik menjembatani dua kutub: militerisme dan regenerasi. Prabowo membawa warisan Orde Baru, narasi nasionalisme keras, dan gaya kepemimpinan paternalistik yang berakar pada struktur komando. Sementara itu, Gibran hadir sebagai representasi generasi digital, anak muda yang diasosiasikan dengan kecepatan, teknologi, dan gaya komunikasi informal. Namun dalam psikologi politik, pasangan semacam ini sering kali memunculkan disonansi naratif: mereka tidak dibentuk oleh kesamaan ideologis, melainkan oleh kalkulasi elektoral dan rekayasa koalisi besar. George E. Marcus menyebut bahwa dalam lanskap politik emosional, warga tidak hanya menilai gagasan, tetapi juga mencari koherensi afektif, yaitu keselarasan antara citra, gestur, dan keputusan (Marcus, 2002). Ketika narasi

kepemimpinan dibangun dari kompromi simbolik, maka konsistensi menjadi tantangan utama, bukan hanya dalam kebijakan, tetapi dalam resonansi emosional yang dibutuhkan agar warga merasa dipimpin, bukan sekadar disugahi citra.

Sejak hari pertama, janji-janji besar dilontarkan. Seperti, makan bergizi gratis untuk anak-anak, reformasi birokrasi, stabilitas ekonomi, dan penguatan pertahanan. Janji-janji ini bukan sekadar kebijakan, tetapi juga simbol atau tanda-tanda awal dari sebuah rezim yang ingin membentuk imajinasi kolektif tentang masa depan. Dalam teori simbolisme politik, janji berfungsi sebagai “afektif performatif”: ia tidak hanya menyampaikan rencana, tetapi juga mengatur harapan, membentuk emosi, dan menciptakan rasa keterikatan antara warga dan negara (Edelman, 1985). Ketika Prabowo menyebut program makan bergizi gratis sebagai “investasi masa depan bangsa,” ia sedang membingkai negara sebagai figur ayah yang berperan memberi, melindungi, dan mengasuh. Namun kekuatan simbol bergantung pada kemampuannya untuk diwujudkan. Ketika janji tidak diikuti oleh sistem, ketika infrastruktur tidak mendukung, dan ketika birokrasi tidak bergerak, maka simbol kehilangan daya magisnya. Dalam psikologi politik, ini menciptakan “kekecewaan simbolik” yaitu rasa bahwa negara tidak hanya gagal memenuhi janji, tetapi juga gagal menjaga makna dari janji itu sendiri. Simbol yang tidak diwujudkan bukan hanya kehilangan kredibilitas, tetapi berubah menjadi performa kosong: sebuah pertunjukan yang mengundang tepuk tangan di awal, tetapi meninggalkan keheningan yang getir di akhir.

Harapan publik terhadap Prabowo-Gibran tidak lahir dari ruang hampa. Ia dibentuk oleh kelelahan terhadap stagnasi, frustrasi terhadap elite lama, dan keinginan untuk melihat negara hadir secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Gejala ini disebut sebagai “harapan kompensatorik” yaitu ketika publik memilih pemimpin bukan karena percaya sepenuhnya, tetapi karena tidak lagi percaya pada alternatif lain (Jost, Banaji, dan Prentice, 2003). Dalam konteks ini, setahun pertama bukan hanya soal kebijakan, tetapi tentang bagaimana negara menjawab kebutuhan psikologis warganya untuk merasa memiliki ruang, suara, dan masa depan.

Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia, hadir bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai simbol generasi digital. Generasi ini dikonotasikan sebagai generasi yang tumbuh bersama algoritma, kecepatan informasi, dan estetika komunikasi yang serba instan. Ia membawa citra pembaruan, bukan karena gagasan yang diusung, tetapi karena usia dan medium yang digunakan. Namun dalam satu tahun pertama, simbolisme itu belum bertransformasi menjadi agensi politik yang nyata. Gibran lebih sering tampil dalam acara seremonial dan unggahan media sosial daripada dalam perumusan kebijakan strategis. CELIOS mencatat bahwa peran Gibran dalam proses pengambilan keputusan masih kabur, dan komunikasi publiknya belum menunjukkan arah yang jelas.¹ Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut oleh para analis sebagai “representasi tanpa otoritas” yaitu ketika figur digunakan untuk membentuk harapan kolektif, tetapi tidak diberi ruang struktural untuk mewujudkannya (Marcus, 2002).

¹ CELIOS, “100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Peran Wakil Presiden,” 5 Oktober 2025, <https://celios.or.id/analisis/100-hari-prabowo-gibran-peran-wapres>.

Ketika ekspektasi publik bertemu dengan kekosongan peran, maka yang muncul bukan inspirasi, melainkan rasa frustrasi warga negara. Politik generasi muda membutuhkan lebih dari simbol, ia membutuhkan struktur yang memungkinkan suara menjadi keputusan.

Antara Janji dan Performa: Populisme sebagai Gaya Kekuasaan

Gaya komunikasi politik pemerintahan Prabowo-Gibran dalam satu tahun pertama menunjukkan pola *top-down*. Pola yang penuh dengan retorika besar, tapi minim mekanisme pelaksanaan yang transparan. Janji-janji disampaikan dalam format yang seragam: padat slogan dan miskin data. Ketika kritik muncul, respons pemerintah lebih bersifat defensif daripada dialogis, seolah komunikasi publik hanya berfungsi sebagai saluran afirmasi, bukan negosiasi. Pola ini menciptakan ketegangan afektif yang tajam yang di mana publik merasa dilibatkan secara simbolik, tetapi diabaikan secara substantif. George E. Marcus menyebut bahwa ketika komunikasi politik gagal menjembatani antara harapan dan kenyataan, maka yang terkikis bukan hanya kepercayaan, tetapi juga rasa memiliki terhadap negara (Marcus, 2002). Retorika, dalam konteks ini, bukan lagi alat pengikat, melainkan pemicu frustrasi. Ia menjanjikan masa depan, tetapi tidak memberi jalan menuju ke sana. Ketika kata-kata kehilangan kaitannya dengan tindakan, maka politik berubah menjadi gema kosong yang hanya berisi mengulang janji, tetapi tak menjawab keraguan.

Ketegangan antara performa dan substansi menjadi pola yang berulang dalam satu tahun pertama. Pemerintah tampak lebih sibuk membangun citra daripada membangun sistem. Program makan bergizi gratis, ekspansi kabinet, dan janji reformasi birokrasi diluncurkan dengan narasi besar, namun

minim detail teknis, indikator dampak, atau mekanisme evaluasi. Tindakan politik lebih sering diarahkan untuk membentuk persepsi daripada menyelesaikan masalah. Fenomena ini dalam psikologi politik mencerminkan apa yang disebut sebagai “politik performatif” yaitu ketika gestur, slogan, dan visualisasi menggantikan kerja institusional (Moffitt, 2016). Dengan kata lain, tindakan politik lebih ditujukan untuk membentuk persepsi daripada menyelesaikan masalah. Performa mendominasi substansi, dan simbol menggantikan sistem. Dalam lanskap semacam ini, simbol menjadi pusat, dan sistem menjadi latar. Lauren Berlant menyebut bahwa ketika performa mendominasi substansi, maka politik berubah menjadi koreografi harapan: indah dilihat, tetapi rapuh dijalankan (Berlant, 2011). Ini bukan sekadar soal gaya komunikasi, tetapi soal arah pemerintahan itu sendiri, apakah ia akan menjadi ruang transformasi struktural, atau sekadar panggung citra yang terus diperbarui tanpa fondasi.

Program Makan Bergizi Gratis: Janji, Simbol, dan Ketidaksiapan Sistemik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan bukan hanya sebagai kebijakan, tetapi sebagai simbol moral negara. Ia dijanjikan sebagai bentuk keberpihakan terhadap anak-anak, sebagai investasi gizi dan masa depan. Dalam pidato peluncurannya, Prabowo menyebut MBG sebagai “hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.” Namun, janji yang menyentuh emosi publik sering kali berfungsi sebagai alat performatif, dan bukan transformatif. Benjamin Moffitt menyebut ini sebagai “*populism-as-performance*” di mana pemimpin tampil sebagai penyelamat dalam krisis yang diciptakan sendiri, menawarkan solusi yang bersifat teatrikal dan tidak sistemik (Moffitt, 2016). Ketika “kasih sayang” negara dibingkai dalam retorika, tetapi tidak diikuti

oleh kapasitas kelembagaan, maka janji berubah menjadi beban kolektif.

Program MBG, yang digadang sebagai investasi masa depan bangsa, menghadapi tantangan struktural yang jauh lebih kompleks daripada yang tercermin dalam narasi peluncurannya. Banyak sekolah belum memiliki dapur, fasilitas penyimpanan, atau tenaga logistik yang memadai untuk mendistribusikan makanan secara aman dan konsisten. Kajian dari CISDI menunjukkan bahwa hingga kini belum tersedia regulasi nasional yang mengatur standar kualitas makanan, mekanisme evaluasi dampak gizi, maupun sistem pemantauan yang terintegrasi.² Ketidaksiapan ini bukan hanya teknis, tetapi juga kelembagaan. Belum ada koordinasi lintas kementerian yang jelas, dan tanggung jawab pelaksanaan di tingkat daerah masih kabur. Dalam kondisi seperti ini, risiko operasional meningkat. Lebih dari 5.600 kasus keracunan tercatat di 17 provinsi, mendorong sejumlah lembaga kesehatan masyarakat menyerukan moratorium dan evaluasi menyeluruh terhadap program.³ Komnas HAM menegaskan bahwa hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan pelaksanaan MBG harus memenuhi prinsip ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas.⁴

Respons publik terhadap MBG menunjukkan dinamika yang khas dalam psikologi kebijakan. Antusiasme awal yang tinggi perlahan bergeser menjadi skeptisisme kolektif. Bukan karena masyarakat menolak gagasan makan bergizi

gratis, tetapi karena pelaksanaannya belum menunjukkan kesiapan sistemik. Ketika janji kebijakan tidak ditopang oleh infrastruktur dan regulasi yang memadai, maka kepercayaan publik mulai tergerus —bukan dalam bentuk penolakan eksplisit, tetapi dalam bentuk penilaian rasional terhadap kapasitas negara. Dalam konteks ini, retorika besar tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan untuk mengakui keterbatasan sambil memperbaikinya. Jika tidak, maka MBG berisiko menjadi simbol yang kehilangan makna: sebuah janji yang terus diulang, tetapi tidak pernah benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari warga.

Program MBG menjadi cermin dari ketegangan mendasar antara niat dan kapasitas. Pemerintah ingin bergerak cepat, namun kecepatan itu tidak selalu diiringi dengan ketepatan desain dan kesiapan sistem. CELIOS menyebut MBG sebagai program yang paling banyak dibicarakan dalam setahun pertama, tetapi juga paling rentan terhadap kegagalan sistemik.⁵ Laporan mereka menunjukkan bahwa MBG belum memiliki kerangka tata kelola yang jelas, dan pelaksanaannya bergantung pada inisiatif lokal yang tidak seragam. Dalam banyak kasus, distribusi makanan dilakukan tanpa standar operasional yang konsisten, dan pengawasan lintas sektor masih lemah. Ketika kebijakan dijalankan lebih sebagai respons politik daripada sebagai hasil

² CISDI, "Picu 5.626 Kasus Keracunan, CISDI Mendesak Presiden Prabowo Segera Moratorium dan Evaluasi Menyeluruh Program MBG," *CISDI.org*, 19 September 2025, <https://cisdi.org/siaran-pers/moratorium-MBG>.

³ JPPI, "JPPI Beberkan Data Statistik Keracunan MBG, Ada Kasus di Dua Provinsi Baru," *Detik.com*, 13 Oktober 2025, <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8157975/jppi-beberkan-data-statistik-keracunan-mbg-ada-kasus-di-dua-provinsi-baru>.

⁴ Komnas HAM, "Pernyataan Sikap atas Pelaksanaan Program MBG," *KomnasHAM.go.id*, 25 September 2025, <https://www.komnasham.go.id/berita/pernyataan-sikap-mbg-2025>.

⁵ CELIOS, *Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa?*, 2025, <https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/12/CELIOS-Laporan-MBG.pdf>.

perencanaan teknokratik, maka yang muncul adalah kesenjangan performatif yaitu ketika citra dan kenyataan tidak berjalan beriringan, dan publik mulai meragukan kredibilitas pemimpin.⁶ Dalam situasi semacam ini, legitimasi tidak dibangun dari keberhasilan yang terukur, tetapi dari ilusi keberhasilan yang dikemas dalam narasi visual dan retorika.

Menurunnya Partisipasi dan Krisis Kepercayaan Publik

Di balik kegagalan teknis MBG, terdapat persoalan yang lebih mendasar yaitu absennya mekanisme partisipatif dalam perumusan kebijakan. Tidak ada forum publik yang melibatkan guru, orang tua, atau ahli gizi dalam desain program, padahal mereka adalah aktor utama dalam ekosistem pendidikan dan kesehatan anak. Partisipasi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi inti dari demokrasi deliberatif karena hanya melalui keterlibatan warga, kebijakan memperoleh legitimasi yang bersifat afektif dan substantif (Fung, 2025). Ketika warga tidak dilibatkan, mereka tidak merasa menjadi bagian dari negara, dan kebijakan yang dihasilkan kehilangan daya ikat sosialnya. MBG, dalam bentuknya yang sekarang, lebih menyerupai pemberian dari atas, bukan hasil dialog dari bawah. Dalam psikologi politik, pola ini menciptakan paternalisme kebijakan: negara tampil sebagai pemberi, tetapi tidak sebagai pendengar. Dan ketika pemberian tidak disertai dengan pengakuan atas suara warga, maka yang terbentuk bukan solidaritas, melainkan jarak.

Respons pemerintah atas kritik yang diarahkan pada program MBG menunjukkan

pola komunikasi yang cenderung defensif dan teknokratis. Alih-alih membuka ruang evaluasi yang partisipatif, pemerintah lebih menonjolkan capaian kuantitatif yang menekankan jumlah penerima manfaat, volume makanan yang didistribusikan, dan cakupan wilayah pelaksanaan. Namun dalam psikologi publik, angka tidak selalu menghadirkan ketenangan. James C. Scott mengingatkan bahwa negara kerap “melihat” warganya melalui statistik, bukan melalui pengalaman hidup mereka (Scott, 1998). Ketika kualitas pelaksanaan dikalahkan oleh ambisi kuantitatif, publik mulai merasa bahwa mereka hanya menjadi angka dalam laporan, bukan manusia yang menjadi subjek utama kebijakan. MBG menjadi ilustrasi bahwa kebijakan sosial tidak cukup dibangun dari niat baik dan target politik, tetapi harus ditopang oleh sistem yang mampu mendengar, belajar, dan melibatkan warga secara aktif.

Di tengah sorotan terhadap MBG, pemerintah juga mengumumkan kebijakan fiskal yang menunjukkan ketidakkonsistenan arah. Di satu sisi, alokasi anggaran sosial ditingkatkan untuk mendukung program-program populis seperti MBG. Sedangkan di sisi lain, subsidi energi dipangkas dan utang luar negeri mengalami kenaikan yang signifikan. CELIOS mencatat bahwa defisit fiskal Indonesia pada kuartal pertama 2025 mencapai 2,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB), angka tertinggi sejak masa pandemi.⁷ Ketidakseimbangan ini menciptakan ambivalensi kebijakan, sebuah kondisi ketika negara mengirimkan sinyal campuran kepada publik: antara keberpihakan sosial dan pengetatan fiskal. Ambivalensi semacam ini berisiko mengguncang rasa

⁶ Nailul Huda, “Geger Laporan Fiktif, Celios Desak Moratorium Total MBG,” *Bisnis.com*, 9 Oktober 2025, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20251009/12/1918884/geger-laporan-fiktif-celios-desak-moratorium-total-mbg>.

⁷ CELIOS, “Celios Tawarkan Solusi Berkelanjutan Soal Defisit Fiskal Indonesia,” *GoodStats*, 16 Agustus 2025, <https://goodstats.id/article/celios-tawarkan-solusi-berkelanjutan-soal-defisit-fiskal-indonesia-t2Myc>.

aman ekonomi warga. Ketika arah fiskal tidak dijelaskan secara transparan dan komunikasi publik gagal membangun narasi yang konsisten, maka kepercayaan terhadap rasionalitas negara mulai melemah. Warga tidak hanya bingung, tetapi juga mulai mempertanyakan apakah negara benar-benar memahami prioritas mereka, atau sekadar merespons tekanan politik jangka pendek tanpa kerangka ekonomi yang berkelanjutan.

Kepailitan industri strategis menambah lapisan ketidakpastian dalam tahun pertama pemerintahan. Dua BUMN energi yaitu PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) serta satu perusahaan pangan nasional, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang tergabung dalam *holding* ID FOOD, mengalami restrukturisasi darurat. Pemerintah menyebut proses ini sebagai “penataan ulang”. Namun, laporan dari INDEF menunjukkan bahwa krisis likuiditas di ketiga entitas tersebut telah berlangsung sejak akhir 2024 dan belum ditangani secara sistemik.⁸ Krisis ekonomi bukan semata soal neraca keuangan, tetapi soal persepsi kehilangan kendali. Ketika negara gagal menjaga stabilitas sektor-sektor strategis, rasa cemas kolektif meningkat. Warga mulai merasakan bahwa negara tidak lagi mampu menjamin masa depan, dan dalam ruang psikologis semacam itu, populisme menemukan panggungnya.

Ketidakpastian ekonomi di awal pemerintahan bukan sekadar soal kebijakan fiskal, melainkan tentang bagaimana negara merespons dan meredakan rasa takut publik. Ketakutan adalah emosi yang paling mudah digerakkan, namun paling sulit diredakan. Ketika pemerintah

gagal menjelaskan arah fiskal secara transparan, tidak mampu menjaga keberlangsungan industri strategis, dan abai membangun komunikasi yang jujur, ketakutan itu tidak hilang—ia berubah menjadi sinisme. Dalam sinisme, harapan tidak lenyap seketika, tetapi terkikis perlahan. Warga tidak lagi menunggu solusi, melainkan mulai menjauh. Bukan karena apatis, melainkan karena kepercayaan telah retak. Babak ini memperlihatkan bahwa kerusakan dalam kebijakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga emosional. Dan dalam demokrasi, retakan emosional bukan sekadar gangguan komunikasi, melainkan awal dari delegitimasi: ketika warga tidak lagi merasa terhubung secara batin dengan negara, maka jarak politik menjadi semakin sulit dijembatani.

Ekspansi kabinet dalam tahun pertama bukan sekadar penambahan struktur administratif, melainkan peneguhan arsitektur kekuasaan. Penunjukan wakil menteri tambahan dan pembentukan badan baru dilakukan atas nama efisiensi, namun pola distribusi jabatan menunjukkan patronase yang kuat. PUSKAPOL UI mencatat bahwa 72% posisi strategis diisi oleh figur partai koalisi, didominasi oleh elite lama, dengan representasi perempuan dan kelompok muda yang nyaris absen.⁹ Dalam psikologi politik, konfigurasi semacam ini mencerminkan “politik pengamanan” yang artinya strategi pembagian kekuasaan yang bertujuan meredam potensi oposisi internal, bukan memperkuat kapasitas institusional negara. Ketika birokrasi dijalankan sebagai instrumen loyalitas, efektivitas berubah menjadi kalkulasi politik. Demokrasi tetap berlangsung secara

⁸ INDEF, “Monitoring Issue of Food, Energy and Sustainable Development – Juni 2025,” *INDEF.or.id*, 13 Juli 2025, <https://indef.or.id/publikasi/monitoring-issue-of-fesd-juni-2025/>.

⁹ PUSKAPOL UI, “Peta Politik Kabinet Prabowo-Gibran: Patronase dan Representasi,” *PUSKAPOL.UI.ac.id*, 5 Oktober 2025, <https://puskapol.ui.ac.id/publikasi/kabinet-prabowo-gibran-patronase-dan-representasi/>.

prosedural, tetapi kehilangan daya inovatifnya. Bukan karena ketiadaan ide, melainkan karena ruangnya telah dikunci oleh kompromi kekuasaan.

Gaya kekuasaan Prabowo menunjukkan pola yang khas yaitu sentralistik, simbolik, dan militeristik. Keputusan strategis diambil secara tertutup, komunikasi publik dilakukan melalui pidato-pidato besar, dan narasi nasionalisme digunakan sebagai pengikat. Gaya kepemimpinan semacam ini disebut sebagai “kepemimpinan maskulin otoritarian” yang artinya di mana kekuasaan ditampilkan sebagai ketegasan, bukan dialog (Taub, 2020). Gibran, sebagai figur muda, belum menunjukkan peran yang menyeimbangkan gaya ini. Ketika kekuasaan terlalu terpusat, maka ruang deliberatif menyempit. Demokrasi tidak mati, tetapi kehilangan napasnya. Dalam konteks ini, simbolisme menggantikan substansi, dan performa menggantikan partisipasi.

Konsolidasi elite dalam tahun pertama berdampak pada konfigurasi kekuasaan dan psikologi publik. Ketika posisi strategis diisi oleh figur yang sama, dan keputusan besar diambil tanpa partisipasi terbuka, publik mulai merasa terasing dari negara yang seharusnya mewakili mereka. Hibbing dan Theiss-Morse menyebut kondisi ini sebagai “*stealth democracy*”, suatu keadaan di mana warga mendambakan pemerintahan yang efisien, tetapi merasa frustrasi ketika proses politik berlangsung terlalu tertutup dan elitis (Hibbing dan Theiss-Morse, 2002). Dalam konteks Indonesia, frustrasi semacam ini jarang mewujud dalam bentuk protes terbuka: ia lebih sering hadir sebagai apatisme, sinisme, atau penarikan diri dari ruang publik. Apatisme adalah bentuk delegitimasi yang paling sunyi, tetapi paling dalam. Ia tidak berteriak, tetapi perlahan menggerogoti fondasi kepercayaan, menjauhkan warga dari proses politik yang seharusnya menjadi milik bersama.

Gaya komunikasi elite dalam periode ini memperlihatkan kecenderungan untuk mereduksi kompleksitas politik menjadi narasi tunggal yang stabil dan emosional. Pidato-pidato Prabowo menekankan stabilitas, nasionalisme, dan loyalitas sebagai nilai utama, sementara Gibran tampil dalam format informal yang lebih visual dan digital. Namun keduanya belum menunjukkan pola komunikasi yang deliberatif atau responsif terhadap dinamika publik. Jeffrey Alexander mengingatkan bahwa komunikasi politik yang bersifat performatif cenderung mengutamakan citra dan emosi daripada argumentasi dan dialog yang substansial (Alexander, 2010). Dalam konfigurasi semacam ini, komunikasi tidak lagi menjadi medium untuk membangun pemahaman bersama, melainkan alat untuk membentuk persepsi yang terkendali. Ketika bahasa negara tidak mencerminkan pengalaman warga, maka yang muncul adalah “jarak epistemik” kesenjangan antara narasi kekuasaan dan realitas publik yang semakin sulit dijembatani.

Meski ruang formal semakin menyempit, resistensi sipil tetap menemukan jalannya. Resistensi itu hadir dalam bentuk yang tersebar, tidak terkoordinasi, dan sering kali bersifat episodik. Demonstrasi mahasiswa, kritik dari organisasi masyarakat sipil, dan kampanye digital menunjukkan bahwa kapasitas oposisi belum sepenuhnya hilang, hanya bergeser ke medan yang lebih cair. Sidney Tarrow menekankan bahwa gerakan sosial tidak selalu lahir dari kekuatan terorganisir, melainkan dari “*political opportunity structures*” yaitu celah dalam sistem yang memungkinkan ekspresi ketidakpuasan (Tarrow, 2011). Celah itu muncul melalui ketidakkonsistenan kebijakan, represi simbolik, dan komunikasi politik yang tidak mendengar. Namun resistensi yang tidak direspons dengan dialog justru memperkuat polarisasi. Ketika kritik ditanggapi dengan

pengabaian atau delegitimasi, oposisi berubah menjadi antagonisme, dan antagonisme menjadi bahan bakar delegitimasi yang lebih dalam.

Ketidakpercayaan publik terhadap elite politik bukan semata soal isi kebijakan, tetapi tentang cara kekuasaan dijalankan dan dirasakan. Margaret Levi dan Laura Stoker menunjukkan bahwa kepercayaan politik dibangun dari pengalaman konsistensi antara kata dan tindakan bukan dari retorika, janji, atau citra (Levi dan Stoker, 2000). Konsistensi itu belum tampak. Ketika janji tidak diikuti oleh sistem, dan komunikasi tidak diiringi oleh partisipasi, publik mulai menarik diri. Ketidakpercayaan dalam psikologi politik bukan sekadar reaksi, tetapi mekanisme pertahanan kolektif. Ia muncul ketika warga merasa bahwa negara tidak lagi menjadi ruang aman. Dan dalam demokrasi, rasa aman bukan kemewahan, melainkan fondasi dari legitimasi. Tanpa rasa aman, partisipasi berubah menjadi penghindaran, dan penghindaran merupakan energi laten bagi perlawanan.

Demokrasi yang Menyempit dan Estetika Kekuasaan

Dalam tahun pertama pemerintah Prabowo-Gibran, isu hak asasi manusia tidak hadir sebagai agenda aktif, melainkan sebagai ruang yang sengaja dikosongkan. Penanganan demonstrasi mahasiswa yang represif, pembatasan akses informasi publik, dan stagnasi dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu menunjukkan bahwa negara lebih memilih stabilitas simbolik daripada keadilan substantif. Stanley Cohen menyebut pola ini sebagai “*denial by omission*” yang

diartikan sebagai penyangkalan institusional di mana negara memilih untuk tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak bertindak atas penderitaan yang telah diketahui (Cohen, 2001). Komnas HAM mencatat penurunan akses terhadap dokumen publik, terutama dalam kasus Papua dan pelanggaran sipil di wilayah konflik.¹⁰ Pengabaian semacam ini melahirkan trauma institusional, bukan sekadar kegagalan melindungi, tetapi kegagalan mengakui.

Represi digital menjadi wajah baru dari kontrol negara yang tidak lagi mengandalkan kekerasan fisik, tetapi pengawasan yang subtil dan meresap. SAFEnet mencatat tujuh bentuk represi digital selama demonstrasi Agustus 2025, termasuk pemanggilan aktivis, pembatasan akses internet, dan pemantauan media sosial.¹¹ Bentuk-bentuk ini bekerja melalui mekanisme pengawasan yang membuat warga mengatur diri sendiri, membatasi ekspresi sebelum negara melakukannya. Michel Foucault menyebut ini sebagai “panoptikon sosial” yaitu struktur kekuasaan di mana rasa diawasi menjadi alat utama kontrol (Foucault, 1995). Fenomena ini dikenal sebagai internalisasi represi yaitu ketika ketakutan tidak lagi datang dari luar, tetapi hidup dalam ruang mental warga negara sendiri. Warga mulai bertanya apakah aman untuk berbicara, maka kebebasan telah bergeser dari hak menjadi risiko. Demokrasi yang sehat tidak tumbuh dari ketertiban yang dipaksakan, tetapi dari ruang yang memberi tempat bagi ketidaknyamanan, perbedaan, dan suara yang tidak selalu selaras.

Ketegangan antara keamanan dan kebebasan menjadi tema laten. Pemerintah menekankan

¹⁰ Komnas HAM, “Laporan Situasi HAM Papua dan Wilayah Konflik 2025,” *KomnashAM.go.id*, 10 September 2025, <https://www.komnasham.go.id/laporan/papua-konflik-2025>.

¹¹ SAFEnet, “Tujuh Bentuk Represi Digital Selama Aksi Mahasiswa Agustus 2025,” *safenet.or.id*, 30 Agustus 2025, <https://safenet.or.id/2025/08/represi-digital-agustus>.

pentingnya ketertiban, namun tidak menjelaskan batas-batasnya. Corey Robin menunjukkan bahwa dalam sejarah politik modern, ketakutan sering digunakan sebagai justifikasi untuk memperluas kekuasaan negara (Robin, 2004). Ketika keamanan tidak didefinisikan secara demokratis, maka ia menjadi alat represi yang sah. Dalam konteks ini, kebebasan bukan hanya soal hak, tetapi soal keberanian untuk berbeda. Dan ketika keberanian itu dibungkam, maka demokrasi kehilangan daya kritisnya. Ketertiban yang tidak memberi ruang bagi perbedaan bukanlah ketertiban sipil, melainkan ketertiban administratif dan dalam situasi semacam itu, warga tidak hidup, mereka hanya diatur.

Hak-hak sipil tidak dibatalkan secara eksplisit, tetapi dikikis melalui prosedur yang tampak sah. Akses terhadap informasi publik dibatasi lewat regulasi teknis, ruang ekspresi dikontrol melalui narasi ketertiban, dan partisipasi warga dibingkai sebagai potensi gangguan. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menyebut ini sebagai *“democratic erosion through legalism”* yang artinya ketika demokrasi tidak diruntuhkan oleh kudeta, tetapi oleh aturan yang dibuat untuk membatasi kebebasan secara bertahap (Levitsky dan Ziblatt, 2018: 83-87). Nancy Bermeo menyebutnya sebagai *“executive aggrandizement,”* di mana perluasan kekuasaan eksekutif dilakukan melalui jalur hukum, namun menggerus partisipasi dan akuntabilitas (Bermeo, 2016). Proses ini menciptakan disonansi afektif dalam diri warga. Warga tetap hidup dalam sistem demokrasi, tetapi tidak lagi merasakan makna demokrasi itu sendiri. Demokrasi berubah dari ruang hidup menjadi ruang formal, dari pengalaman menjadi prosedur.

Trauma demokrasi muncul bukan hanya ketika negara gagal melindungi, tetapi juga ketika ia berhenti mendengarkan. Banyak warga merasa bahwa kritik mereka tidak direspons, bahwa

partisipasi mereka tidak dihitung, dan bahwa kehadiran mereka tidak diakui. Lisa Wedeen menyebut ini sebagai *“symbolic domination”* yaitu ketika negara tidak membungkam secara fisik, tetapi mengabaikan secara simbolik (Wedeen, 2000). Hartmut Rosa menyebut kehilangan resonansi sebagai bentuk alienasi terdalam: ketika dunia tidak lagi menjawab, maka subjek kehilangan makna eksistensialnya (Rosa, 2019). Resonansi adalah ketika suara warga menemukan gema dalam sistem. Ketika gema itu hilang, maka partisipasi berubah menjadi penghindaran, dan penghindaran menjadi bentuk sunyi dari perlawanan. Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam, tetapi perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk menjawab persoalan.

Populisme Kesejahteraan dan Ketergantungan yang Dilembagakan

Sejak hari pertama berkuasa, narasi kesejahteraan menjadi poros utama komunikasi politik pemerintah. Program MBG, janji subsidi pupuk, dan wacana Patriot Bond dikemas sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Namun dalam ekonomi politik populisme, kesejahteraan sering kali dibingkai sebagai pemberian, bukan sebagai hak. Prasetyantoko menyebut bahwa populisme ekonomi di Indonesia cenderung mengedepankan distribusi simbolik daripada reformasi struktural (Prasetyantoko, 2025). Distribusi simbolik ini tidak mengubah struktur ketimpangan, tetapi memperkuat citra negara sebagai pelindung. Relasi semacam ini menciptakan *“ketergantungan afektif”*. Artinya rasa aman yang dibangun bukan dari sistem yang adil, tetapi dari figur yang memberi (Aspinall dan Berenschot, 2019). Ketika negara tampil sebagai pemberi, bukan sebagai pengatur sistem, maka kontrak sosial berubah menjadi relasi patron-klien. Warga tidak lagi menuntut hak, tetapi menunggu kemurahan hati negara.

Ilusi kesejahteraan dalam populisme bukan hanya soal angka, tetapi soal persepsi yang dikonstruksi. Pemerintah menekankan capaian kuantitatif: jumlah bantuan, volume subsidi, dan ekspansi program. Tetapi, laporan dari Nursyam Centre menunjukkan bahwa banyak program tidak memiliki indikator dampak yang jelas, dan evaluasi berbasis data masih minim.¹² Situasi ini menciptakan “kesejahteraan semu” yang artinya ketika warga merasa dibantu, tetapi tidak mengalami perubahan struktural. Jacques Rancière menyebut bahwa politik yang hanya memberi tanpa mengakui kesetaraan adalah bentuk “pembungkaman melalui pemberian.” (Rancière, 1999). Bantuan menjadi alat kontrol, bukan alat pembebasan. Ketika pemberian menjadi rutinitas, bukan transisi menuju kemandirian, maka negara tidak sedang membebaskan, tetapi sedang mengikat. Dalam pengulangan itu, politik kehilangan arah transformasinya, dan warga kehilangan kapasitasnya untuk menuntut.

Pemberian negara tidak hanya menjadi alat distribusi, tetapi juga menjadi instrumen pembentukan relasi kekuasaan. Bantuan sosial, subsidi, dan program populis dikemas sebagai bentuk kasih sayang negara, tetapi jarang disertai dengan mekanisme partisipatif atau transparansi alokasi. Marcel Mauss, dalam kajiannya tentang *“the gift,”* menunjukkan bahwa pemberian tidak pernah netral, ia menciptakan kewajiban, membentuk hierarki, dan menuntut balasan (Mauss, 1990). Dalam konteks negara, pemberian yang tidak disertai dengan pengakuan hak menciptakan relasi paternalistik yaitu di mana negara menjadi ayah yang memberi, dan warga menjadi anak yang bergantung. Psikologi politik menyebut ini sebagai “dependensi terlembagakan” yang

dapat diartikan bahwa ketika bantuan bukan lagi jembatan menuju kemandirian, tetapi pagar yang membatasi gerak (Aspinall dan Berenschot, 2019). Dalam sistem semacam ini, warga tidak didorong untuk bertanya, tetapi dipaksa hanya untuk menerima.

Ketergantungan yang dilembagakan memiliki dampak jangka panjang yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis. Ketika warga terbiasa menerima tanpa dilibatkan, maka kapasitas politik mereka melemah. Mereka tidak lagi melihat negara sebagai ruang negosiasi, tetapi sebagai sumber pemberian. Paulo Freire menyebut ini sebagai “kultur bisu” yang artinya ketika masyarakat tidak berbicara karena tidak pernah diajak berbicara (Freire, 2000). Banyak program sosial yang berjalan tanpa forum evaluasi publik, tanpa ruang koreksi, dan tanpa narasi kesetaraan. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai “kehilangan agensi” atau sebuah rasa bahwa diri tidak lagi mampu memengaruhi dunia (Sennet, 1992). Ketika agensi hilang, maka demokrasi tidak hanya kehilangan partisipasi, tetapi kehilangan jiwa. Negara yang memberi tanpa mendengar bukanlah negara yang peduli, tetapi negara yang bekerja dalam kebungkaman warganya.

Estetika Kekuasaan dan Politik Citra

Kekuasaan Prabowo-Gibran tidak hanya dijalankan melalui kebijakan, tetapi juga melalui simbol. Pidato-pidato Prabowo yang penuh metafora, parade militer, dan visualisasi kabinet yang seragam menunjukkan bahwa estetika menjadi bagian dari strategi politik. Dalam teori politik visual, simbol bukan sekadar ornamen, tetapi instrumen afektif yang membentuk persepsi publik. Murray Edelman

¹² Nursyam Centre, “Indonesia 2025: Ekonomi dan Politik Menuju Indonesia Emas,” 13 Januari 2025, https://nursyamcentre.com/artikel/opini/indonesia_2025_ekonomi_dan_politik_menuju_indonesia_emas_bagian_pertama.

menyebut bahwa “*political spectacle*” adalah cara negara mengelola emosi warga melalui citra, bukan melalui substansi (Edelman, 1985). Ketika kekuasaan tampil dalam bentuk yang indah, maka kritik menjadi sulit, karena estetika menciptakan rasa kagum yang menunda pertanyaan. Dalam psikologi politik ini disebut sebagai “pengalihan afektif” yaitu ketika emosi diarahkan untuk mengagumi, bukan untuk memahami.

Estetika kekuasaan dalam tahun pertama juga tampak dalam cara negara membingkai ruang publik. Penggunaan seragam, tata panggung acara kenegaraan, dan narasi visual di media sosial menciptakan kesan keteraturan yang nyaris teatrikal. Susan Sontag menyebut bahwa estetika politik yang terlalu rapi sering kali menyembunyikan kekerasan simbolik: keteraturan yang dipaksakan, bukan yang lahir dari dialog (Sontag, 2003). Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya mengatur, tetapi juga mengatur cara ia dilihat. Ketika warga terus-menerus disuguhi citra yang sempurna, mereka mulai meragukan pengalaman mereka sendiri (Berlant, 2011). Ketika citra mendominasi kenyataan, maka politik berubah menjadi pertunjukan, dan warga menjadi penonton yang bungkam.

Media digital menjadi medium utama estetika kekuasaan. Narasi visual tentang kinerja pemerintah, kunjungan lapangan, dan interaksi dengan rakyat dikemas dalam format sinematik: *drone shot*, musik latar, dan *framing* yang menekankan kedekatan. Namun

dalam teori politik visual, kedekatan yang dikonstruksi tidak selalu mencerminkan relasi yang nyata. Nicholas Mirzoeff menyebut bahwa “*visuality*” adalah cara kekuasaan mengatur apa yang boleh dilihat dan bagaimana ia harus dilihat (Mirzoeff, 2011). Dalam konteks ini, negara tidak hanya hadir, tetapi mengatur cara kehadirannya ditafsirkan. Ketika citra menjadi dominan, maka pengalaman warga mulai diragukan (Sontag, 1977). Mereka tidak lagi bertanya “apa yang terjadi,” tetapi “apa yang harus saya rasakan.” Dalam ruang semacam itu, politik berubah menjadi koreografi emosi.

Pencitraan kekuasaan yang intensif juga menciptakan tekanan afektif terhadap warga. Ketika semua visual menampilkan keberhasilan, kedekatan, dan ketertiban, maka ruang untuk keraguan menjadi sempit. Lauren Berlant menyebut ini sebagai “*cruel optimism*” yaitu ketika harapan yang ditawarkan justru menghalangi kemampuan untuk melihat kenyataan (Berlant, 2011). Banyak warga yang merasa bahwa narasi visual pemerintah tidak mencerminkan pengalaman mereka: harga naik, akses layanan publik terbatas, dan ruang kritik menyempit. Namun karena citra yang ditampilkan begitu konsisten dan indah, maka keraguan menjadi beban psikologis. Secara psikologis ini menciptakan “disonansi afektif” yang artinya ketika emosi publik tidak selaras dengan narasi negara, tetapi tidak memiliki ruang untuk diekspresikan. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang untuk ragu, bukan hanya ruang untuk kagum.

Referensi

- Alexander, Jeffrey C. 2010. *The Performance of Politics: Obama's Victory and the Democratic Struggle for Power*. Oxford: Oxford University Press.
- Aspinall, Edward and Berenschot, Ward. 2019. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

- Bermeo, Nancy. 2016. "On Democratic Backsliding," *Journal of Democracy* 27, no. 1: 10–12, <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>.
- Berlant, Lauren. 2011. *Cruel Optimism*. Durham: Duke University Press.
- Cohen, Stanley. *States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering*. Cambridge: Polity Press.
- Edelman, Murray. 1985. *The Symbolic Uses of Politics*. Urbana: University of Illinois Press.
- Freire, Paulo. 2000. *Pedagogy of the Oppressed*, trans. Myra Bergman Ramos. New York: Continuum.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan. New York: Vintage Books.
- Fung, Archon. 2025. "Participation, Deliberation, and Democracy," *Harvard Kennedy School*, <https://www.archonfung.net/>.
- Hibbing, John R. and Theiss-Morse, Elizabeth. 2002. *Stealth Democracy: Americans' Beliefs About How Government Should Work*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jost, John T., Banaji, and Prentice, Mahzarin R., Deborah A. 2003. "System Justification Theory: A Social Psychological Analysis of Endorsement of Inequality." *Political Psychology* 25, no. 6: 881–919.
- Levitsky, Steven and Ziblatt, Daniel. 2018. *How Democracies Die*. New York: Crown Publishing.
- Levi, Margaret and Stoker, Laura. 2000. "Political Trust and Trustworthiness," *Annual Review of Political Science* 3: 475–507.
- Marcus, George E. 2002. *The Sentimental Citizen: Emotion in Democratic Politics*. University Park: Pennsylvania State University Press.
- Mauss, Marcel. 1990. *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies*, trans. Ian Cunnison. London: Routledge.
- Mirzoeff, Nicholas. 2011. *The Right to Look: A Counterhistory of Visuality*. Durham: Duke University Press.
- Moffitt, Benjamin. 2016. *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*. Stanford: Stanford University Press.
- Nursyam Centre, "Indonesia 2025: Ekonomi dan Politik Menuju Indonesia Emas," 13 Januari 2025, https://nursyamcentre.com/artikel/opini/indonesia_2025_ekonomi_dan_politik_menuju_indonesia_emas_bagian_pertama.
- Prasetyantoko, "Populisme Ekonomi," *Kompas.id*, 20 Mei 2025, <https://www.kompas.id/artikel/populisme-ekonomi>.
- Priyetno, Agus. 2024. "Psikologi Politik: Menguak Dinamika Kekuasaan dan Perilaku Politik." *InfoSejarah*, September 25. [https://infosejarah.id/psikologi-politik/..](https://infosejarah.id/psikologi-politik/)
- Rancière Jacques. 1999. *Disagreement: Politics and Philosophy*, trans. Julie Rose. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Robin, Corey. 2004. *Fear: The History of a Political Idea*. Oxford: Oxford University Press.
- Rosa, Hartmut. 2019. *Resonance: A Sociology of Our Relationship to the World*, trans. James C. Wagner. Cambridge: Polity Press.
- Sennett, Richard. 1992. *The Uses of Disorder: Personal Identity and City Life*. New York: W. W. Norton & Company.
- Sontag, Susan. 2003. *Regarding the Pain of Others*. New York: Picador.
- Sontag, Susan. 1977. *On Photography*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Scott, James C. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
- Tarrow, Sidne. 2011. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Taub, Amanda. 2020. "The Rise of Authoritarian Masculinity," *The New York Times*, March.
- Wedeen, Lisa. 2000. "Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric, and Symbols in Contemporary Authoritarianism," *American Political Science Review* 94, no. 3: 377–389.

